

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BALAI PENYULUH KB KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Halimatus Sa'adah¹, Jumaidi², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: halimatussaadah74@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja penyuluh keluarga berencana pada balai keluarga berencana serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh keluarga berencana pada balai penyuluhan keluarga berencana Kecamatan Kelua cukup baik, hal ini dapat dilihat dari aspek kinerja yakni: *Pertama* Kualitas pada indikator Tingkat pendidikan cukup baik, dan dalam hal tujuan yang diharapkan cukup baik. *Kedua* Kuantitas Pada indikatornya Hasil kerja yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan cukup baik dan Sesuai aturan SOP cukup baik. *Ketiga* Batas waktu pada indikatornya ketepatan waktu cukup baik, dan sudah sesuai rencana juga cukup baik. *Keempat* efektivitas biaya pada indikatornya Sumber Daya Manusia cukup baik, Anggaran cukup baik, Teknologi kurang baik dan sarana pendukung cukup baik. *Kelima* kebutuhan dalam pengawas pada indikator komitmen kerja cukup baik dan Tanggung jawab baik. *Keenam* Tingkat ego cukup baik dan kerja sama sudah cukup baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi faktor Penghambat ketidaksesuaian dengan tingkat pendidikan penyuluh, kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. Kedua faktor pendukung yaitu kompetensi dan motivasi dalam bekerja dan Tanggung jawab pekerjaan

Kata Kunci:. Kinerja, Penyuluh Keluarga Berencana, BPKB

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the performance of family planning counselor at the family planning center and find out the factors that influence. This research method uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The results showed that family planning counselors at the family planning counseling center in Kelua Subdistrict is quite good, this can be seen from the performance aspects from the performance aspects, First Quality, The level of education is quite good, and in terms of the expected goals is quite good. Second Quantity, the work results done in providing counseling is quite good and according to the SOP rules is quite good. Third Deadline, the timeliness is quite good, and according to the plan is also quite good. Fourth, cost effectiveness, the Human Resources are quite good, the Budget is quite good, the Technology is not good enough and the supporting facilities are quite good. Fifth needs in supervisors of work commitment are quite good and responsibility is good. Sixth The level of ego is quite good and cooperation is good enough. The factors that influence the factors Inhibiting factors are incompatibility with the level of education of extension workers, lack of human resources and lack of facilities and infrastructure. The second supporting factor is competence and motivation at work and job responsibility.

Keyword: Performance, Family Planning Counselor, BKBD

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan adalah masalah global yang perlu ditangani oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Permasalahan seperti: Pernikahan dini, angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang terus meningkat, dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan bagian dari masalah kependudukan yang cukup kompleks. Tidak dapat dihindari, pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah, seperti kualitas masalah sumber daya manusia yang menurun,

pengangguran, lapangan kerja, kejahatan, dan lain sebagainya yang akan berdampak negatif pada kehidupan negara yang bersangkutan.

Perlu kita sadari bahwa keberhasilan pembangunan di segala bidang baik pemerintah maupun swasta bergantung pada sumber daya manusia sebagai elemen pelaksana. Permasalahan kependudukan adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah penduduk saat ini mencapai 8 miliar tepatnya 8.005 jiwa. Menurut data *review penduduk word* ada sebanyak 175.000 jiwa pada 25 April 2024 dan Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat dengan total 279.390.258 jiwa. Serta pada tahun 2024 meningkat sebanyak 0,82% dari 277.534.122 jiwa.

Menurut badan statistik jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 adalah 2665.783 jiwa, dengan tingkat kepadatan 74,80 jiwa. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Kelua dengan 263,42 ribu jiwa. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, akan ada kendala di berbagai daerah, peningkatan kemiskinan, dan penurunan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penduduk tersebut, perlu adanya program atau kebijakan untuk mengontrol angka kelahiran dan jumlah penduduk. Menurut organisasi kesehatan dunia, program keluarga adalah salah satu strategi, kebijakan, dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bertanggung jawab atas presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN bertanggung jawab atas pengendalian penduduk dan pengelolaan keluarga berencana. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan BKKBN di lini lapangan ini. Penyuluhan keluarga berencana (PKB) bertugas untuk membina dan mempromosikan masyarakat tentang manfaat program keluarga berencana (KB) melalui perencanaan keluarga untuk mendewasakan usia perkawinan, penggunaan kontrasepsi untuk mengurangi jarak kehamilan, dan peningkatan ekonomi keluarga untuk memiliki anak yang baik.

Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dalam melakukan penyuluhan dan pemecahan masalah terkait dengan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Program Keluarga Berencana dirancang oleh BKKBN demi menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial dan spiritual setiap penduduk. Kesuksesan program keluarga berencana karena adanya seorang yang terampil atau memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mensosialisasikan program keluarga berencana, yang sering disebut dengan penyuluh keluarga berencana.

Penyuluh KB sebagai salah satu sumber daya manusia yang menjadi modal dasar BKKBN dalam melaksanakan program, perlu memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan program, keluarga berencana ini sehingga untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Riani mengemukakan bahwa “Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dengan apa yang diberikannya. (Mangkunegara, 2021)

Kecamatan Kelua Merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong berdasarkan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kelua melakukan Kegiatan penyuluhan dalam pelayanan KB ini dilakukan pada setiap desa di Indonesia dilakukan secara rutin dalam agenda mingguan dan bulanan oleh PLKB (Petugas Lapangan KB) se-Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan. Para petugas PLKB ini sudah dilatih dalam bidang penyuluhan program KB. Keterbatasan para PLKB menjadi salah satu masalah yang masih dihadapi. Kecamatan Kelua

terdiri dari 12 desa. Sedangkan Seorang Penyuluh Keluarga Berencana Seharusnya PLKB membina 1 atau 2 desa sedangkan di kecamatan kelua 1 PLKB membina 4 desa.

Dalam menjalankan tugasnya pengendalian penduduk keluarga berencana Penyuluh KB Kecamatan Kelua dibantu PPKBD dalam menjalankan tugas yang sangat penting dalam melaksanakan program KB di lapangan Keberhasilan dan kegagalan penyuluh keluarga berencana dalam pelaksanaan program keluarga berencana sering diidentikkan dengan keberhasilan dan kegagalan penyuluh berencana dalam menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap program keluarga berencana di wilayah, penyuluh keluarga berencana dituntut harus bekerja secara sistematis, terencana dengan mekanisme kerja operasional yang harmonis dengan para tokoh agamanya, tokoh masyarakat, pimpinan wilayah kerja. Dengan pelaksanaan program KB tidak lepas dari penyuluh keluarga berencana. Kinerja penyuluh keluarga berencana kecamatan kelua belum optimal karena ada beberapa penyuluh yang menangani beberapa wilayah dalam hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tenaga fungsional penyuluh keluarga berencana.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Balai Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, ditemukan beberapa masalah yaitu: ketidaksesuaian latar belakang pendidikan penyuluh, kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai, dan sarana serta prasarana yang dinilai belum memadai seperti tidak adanya LCD dan proyektor untuk memfasilitasi kegiatan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara spesifik faktor, baik internal maupun eksternal yang menentukan kinerja Penyuluh keluarga berencana. Maka, penulis tertarik mengangkat judul “Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kelua”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari satu koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana, dua orang penyuluh Keluarga Berencana, dan dua orang operator Penyuluh Keluarga Berencana.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan telah dokumen. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan pedoman wawancara, telaah dokumen dan observasi serta analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi setelah ini menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi. (Prof. Dr. Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Adapun sub fokus terdiri dari kualitas kerja, kuantitas dari hasil kerja, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan pengawasan, dan dampak interpersonal.

1. Kualitas dari hasil

Dalam buku (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernardin dan Russel, kualitas kerja adalah tingkat sejauh mana proses hasil pelaksanaan mendekati kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja penyuluh keluarga berencana dalam bekerja yaitu tingkat pendidikan dan tujuan yang diharapkan jawabnya. Kualitas dari hasil sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi dimana hal ini dapat menjadi sasaran ukuran berhasil tidaknya kinerja dari pegawai didalamnya. Kuantitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai dan pengetahuan seorang pegawai.

Dengan demikian kualitas kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan pegawai. Tingkat pendidikan dan pengetahuan penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai penyuluh keluarga berencana dalam memberikan penyuluhan dalam pelayanan konseling. Pendidikan yang memadai dapat memberikan layanan yang berkualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dalam mensejahterakan masyarakat.

Tujuan utama yang diharapkan adalah memberikan dukungan, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu individu atau kelompok dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling. Pentingnya untuk mengetahui tujuan utama ini bagi penyuluh keluarga berencana dapat memudahkan untuk mengatur rencana kerja dengan baik, agar target-target yang ditetapkan tercapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh. Bapak Arbiyan, S. Ag selaku Koordinator penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua, bahwa:

“Menurut saya kalau di Kecamatan Kelua rata - rata pendidikan pegawai penyuluh keluarga berencana nya sudah sarjana semua walaupun jurusan disini berbeda-beda tetapi mereka saling membantu dalam memberikan penyuluhan. Sedangkan tujuan utama dari pelayanan penyuluhan dan pelayanan konseling di Balai Penyuluhan keluarga berencana adalah memberikan penyuluhan tentang pengetahuan kepada keluarga agar mereka tahu bagaimana pola-pola dan tujuan penyuluhan di Balai Penyuluhan keluarga berencana dan agar meningkatkan kualitas keluarga” (Wawancara 04 November 2024).

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penyuluh keluarga berencana berasal dari latar belakang pendidikan sarjana yang berbeda-beda namun para pegawai penyuluh keluarga berencana tetap saling membantu satu sama lain dalam memberikan penyuluhan. Selain kuantitas kerja, salah satu faktor pendukung kinerja penyuluh keluarga berencana dengan mengetahui tujuan utama bagi penyuluh keluarga berencana adalah memberikan penyuluhan tentang pengetahuan kepada keluarga agar mendapatkan pengetahuan tentang pola-pola dan tujuan penyuluhan di Balai Penyuluhan keluarga berencana. Sebelum melaksanakan tujuan utama ini, para penyuluh keluarga sudah dibekali dengan pengetahuan dan wawasan dalam pelatihan dasar umum dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling.

2. Kuantitas

Jumlah kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam bekerja dan apakah pegawai sesuai aturan standar operasional prosedur (SOP). Kuantitas kerja dinilai sangat penting sebab untuk mengukur tingkat kinerja para pegawainya.

Hasil kerja merupakan output atau hasil yang dicapai dari proses pencapaian dari tugas tertentu. Dengan mengetahui hasil kerja ini dapat menunjang kuantitas hasil kerja penyuluh keluarga. Selain mengetahui hasil kerja, penyuluh keluarga juga dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan standar operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan konseling. Sebagaimana yang diungkapkan oleh. Bapak Nor, S.P. selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua, bahwa:

“Menurut kami disini, hasil kerja yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan dan konseling, kami berharap hasil yang seoptimal mungkin agar masyarakat bisa memahami dan bisa diterima dan di masyarakat juga sadar akan pentingnya yaitu penyuluhan dan konseling tentang keluarga berencana agar masyarakat lebih mengenal luas lagi tentang ber-keluarga berencana. di Balai keluarga berencana ini sudah sesuai dengan aturan dalam

memberikan penyuluhan dan konseling disini yang kami sasar adalah masyarakat yang mempunyai anak yang sudah banyak, dan masyarakat yang sudah mempunyai umur yang lebih tua dalam menjaga bagaimana cara agar bisa menjarangkan angka kelahiran agar masyarakat itu tahu bagaimana cara mengasuh dan meningkatkan supaya keluarga itu menjadi yang berkualitas.” (Wawancara, 04 November 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penyuluh keluarga berencana sudah bekerja dengan baik dalam memberikan penyuluhan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pelayanan dengan optimal dan pegawai penyuluhan keluarga juga sudah bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.

3. Garis Waktu

Garis waktu yaitu tingkat suatu pekerjaan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperbaiki koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. Garis waktu penyuluhan adalah seperti yang sudah dijadwalkan dalam kegiatan penyuluhan dari awal hingga akhir dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling pada Balai penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyuluh keluarga berencana. Garis waktu dapat dilihat dari ketepatan waktu dan sesuai rencana.

Dengan ketepatan waktu dapat bermanfaat bagi penyuluh keluarga untuk dapat melaksanakan tugas kegiatan penyuluhan dan pelayanan konseling secara efisien, efektif dan profesional sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh. Ibu Rahma Fitriah, S. HI. selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua, bahwa:

“Alhamdulillah, kami dari Balai penyuluhan keluarga berencana sudah tepat waktu dalam memberikan penyuluhan dan konseling karena kami memberikannya tepat waktu dalam kegiatan posyandu yang kami undang disitu ada balia dan ada ibu – ibu dan pasangan usia subur dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling disitu kami memberikan berupa alat kontrasepsi yang baik digunakan oleh ibu – ibu apabila yang sudah terlalu banyak anak usia yang sudah tua bisa diberikan alat kontrasepsi seperti implan dan IUD kalau yang baru mempunyai anak 1/2 yang ingin mempunyai anak cepat bisa diberikan penyuluhan menggunakan alat kontrasepsi MKJP, pil, kondom dan suntik. Kami sebelum terjun ke masyarakat Balai penyuluh keluarga berencana setiap awal tahun menyusun kerja apa-apa yang akan dilaksanakan dalam tahun ini Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana meskipun ada tanggal dan waktu yang yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan tersebut.” (Wawancara, 04 November 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pegawai penyuluh keluarga berencana sudah cukup baik sudah dapat melaksanakan tugas kegiatan penyuluhan dan pelayanan konseling, karena pegawai memberikan penyuluhan atau informasi pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling pada Balai penyuluh keluarga berencana tetapi masih ada jadwal penyuluhan yang tidak sesuai karena ada kendala dalam memberikan penyuluhan. Sedangkan terkait dengan sesuai rencana, pegawai sudah cukup baik dan sudah sesuai rencana dalam melakukan tugasnya memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling agar masyarakat paham tentang berkeluarga berencana. Namun ada beberapa tanggal dan waktu yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan tersebut.

4. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya yaitu tingkat penggunaan daya organisasi berupa sumber daya manusia,

keuangan, teknologi, material dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian. Sumber daya manusia (SDM) adalah tenaga kerja atau karyawan dalam suatu instansi. Anggaran merupakan sebagai rencana keuangan yang mendetail untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Teknologi adalah aplikasi dari pengetahuan ilmiah untuk praktis dalam berbagai bidang, seperti: industri, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi yang berguna untuk memudahkan pekerjaan. Sarana pendukung adalah alat untuk fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh. Bapak Muhammad Nor, S. P. bahwa:

“Balai penyuluh KB ini masih belum maksimal dalam memberikan penyuluhan karena kurangnya tenaga penyuluh dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling pada Balai Penyuluh KB di Kecamatan Kelua ini”(Wawancara, 04 November 2024)

Adapun yang disampaikan oleh. Bapak Arbiyan, S. Ag. Selaku Koordinator penyuluhan keluarga Kecamatan Kelua menyatakan bahwa:

“ Balai Penyuluh KB sudah ada berbagai macam anggaran yang didapat dari dinas dan kami juga sudah berkonsultasi kepada aparat desa jika dari dinas anggarannya minim, jadi kami meminta ke desa untuk menganggarkan agar acara atau pelatihan yang kami berikan kepada kader- kader desa itu, baik dari PPKBD, sub PPKBD dan kader-kader lainnya” (Hasil wawancara 04 November 2024)

Lebih lanjut oleh Ibu Nor Hidayanti, S.E. selaku Operator penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua mengatakan bahwa:

“Teknologi yang dilakukan bisa melalui edukasi yang diberikan kepada masyarakat atau kepada kader bisa melalui dari teknologinya seperti esimel digunakan untuk catin.” (Wawancara, 04 November 2024)

Selanjutnya oleh Ibu Rahma Fitriah, S. HI selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam menyiapkan sarana pendukung penyuluhan salah satunya masih ada kader yang sudah dilatih dan sering diundang tapi ada beberapa kader yang tidak hadir, disitu ada kader yang kurang hadir sehingga kurang sumber daya kader tersebut dalam menyampaikan ke masyarakat.” (Wawancara, 04 November 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pada masih terbatasnya sumber daya manusia yang terdapat di Balai penyuluhan keluarga berencana Kecamatan Kelua untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling. Dalam hal anggaran, Balai penyuluhan keluarga berencana memiliki anggaran yang terbatas didapat dari dinas. Namun pihak Desa juga memberikan anggaran kepada Balai penyuluhan agar acara dan pelatihan dapat menjangkau kader-kader dan pegawai penyuluhan keluarga. Selanjutnya dalam teknologi, dapat melalui edukasi yang diberikan kepada masyarakat atau kepada kader agar dapat menggunakan dengan baik, misalnya esimel yang digunakan untuk catin. Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi oleh para pegawai yakni keterbatasan sarana pendukung penyuluhan.

5. Kebutuhan akan Pengawasan

Kebutuhan akan pengawasan yaitu sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan. Kebutuhan akan pengawas sangat penting dilakukan, sebab sejauh mana seorang pegawai dalam arahan dapat dengan baik menjalankan tugas atau tanggung jawabnya yang telah diberikan oleh pegawai. Hal ini dapat terlihat dari komitmen kerja dan tanggung jawab.

Komitmen kerja adalah keterkaitan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dalam melakukan penyuluhan dan pelayanan konseling dengan penuh pengabdian di tempat kerjanya. Tanggung jawab adalah seseorang yang menanggung segala akibat dari perbuatannya, serta melakukan tugasnya dan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh. Seorang pegawai selalu terikat dengan komitmen kerja dan tanggung jawab karena ada tugas pokok dan fungsi yang harus mereka kerjakan di tempat kerjanya. Komitmen dan tanggung jawab dapat dilihat dari hasil kerja dan pengambilan keputusan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Nor, S.P. selaku Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua bahwa:

“ Disini kami ada komitmen baik dari lintas sektor kecamatan dan desa saling mendukung dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling sehingga kami bekerja sama setiap instansi yang ada di kecamatan kelua. Tanggung jawab disini kami berusaha untuk semampunya dalam menyelesaikan dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami dari Balai penyuluh KB untuk memberikan pengertian dan pengetahuan kami kepada masyarakat dengan sesuai apa yang ditugaskan dengan kami jadi kami berusaha menyelesaikan dan memenuhi tanggung jawab.” (Wawancara, 04 November 2024)

Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Nor Hidayanti, S. E. selaku Operator penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua bahwa:

“Komitmen kerja yang diberikan yaitu dengan memberikan semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat baik yang melakukan penyuluhan maupun memberikan pelayanan konseling. untuk menyelesaikan atau memenuhi tanggung jawab ini bagian dari tanggung jawab penyuluh yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan untuk membantu masyarakat atau kader dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan.” (Wawancara, 04 November 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa seorang pegawai penyuluh keluarga perlu memiliki komitmen yang baik untuk dapat memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling terhadap masyarakat serta saling bekerja sama. Seorang pegawai penyuluh keluarga juga dituntut untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai seorang penyuluh untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu masyarakat atau kader.

6. Dampak interpersonal

Tingkat sejauh mana penyuluh dalam memelihara harga diri dan kerjasama diantara rekan kerja dan bawahan. Hal ini bisa dilihat dari tingkat ego dan kerja sama. Tingkat ego adalah tingkat kesadaran dan penalaran pikiran seseorang dalam kepribadian seseorang dengan masyarakat untuk membuat keputusan tentang tindakan yang diambil dalam melakukan tugasnya. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan saling membantu dalam suatu kegiatan. Dengan memiliki tingkat ego maupun kerja sama yang baik dapat berguna untuk mewujudkan capaian hasil yang sudah ditargetkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nor, S.P. selaku Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Kelua bahwa”

“Disini kita terjun ke masyarakat ego yang yang kita hadapi itu berbagai macam baik itu dari kita sebagai penyuluh dan ego yang dihadapi di masyarakat kadang-kadang ego kita ada yang terkontrol dan yang tidak terkontrol apalagi yang kita hadapi ini adalah masyarakat sedangkan di masyarakat itu berbagai macam-macam pikiran yang ditimbulkan sehingga kami dari penyuluh keluarga berencana artinya bisa lah mengontrol baik dari tingkat emosi dan tingkat ego yang diharapkan kepada kami untuk memajukan Balai penyuluhan keluarga berencana Kecamatan Kelua. Selama kami berada di kecamatan kelua dengan adanya Balai penyuluhan keluarga berencana, alhamdulillah kerja sama yang kami berikan kepada baik dari instansi lain, kecamatan dan desa berjalan seiringnya waktu kami sudah bekerja sama dengan baik saling dukung mendukung dengan program ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bagaimana masyarakat tahu tentang keluarga berencana agar masyarakat lebih memahami kegunaan dengan adanya kami di Balai penyuluh keluarga berencana.” (Wawancara, 04 November 2024)

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai penyuluh keluarga berencana memiliki kontrol ego yang baik dengan dapat mengontrol tingkat ego maupun emosi pada saat menghadapi masyarakat yang berbagai macam latar belakang. Dalam hal kerja sama para pegawai pun dinilai dapat dengan baik untuk dapat bekerja sama pada tingkat Kecamatan, Desa, maupun antar kader dan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh keluarga berencana dalam memberikan penyuluhan

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh keluarga berencana pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua. Pasti mendapatkan suatu hambatan dan pendukung. Berikut diuraikan lebih lanjut mengenai hal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kinerja penyuluh keluarga berencana pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua.

a) Faktor Penghambat

1. Ketidaksesuaian tingkat pendidikan penyuluh keluarga berencana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pada Balai penyuluh KB masih ada penyuluh yang tidak sesuai dengan penyuluh KB sehingga penyuluh KB yang ada di Balai penyuluh KB mengikuti pelatihan yang diadakan oleh atasan penyuluh KB.

Hasil penelitian tersebut belum sesuai dengan teori yang dikemukakan Dalam Buku Dr. Syaifuddin, MM (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernardin dan Russel mengemukakan enam kinerja kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja yang menyatakan bahwa salah satu tahap dalam Quality yaitu Tingkat Pendidikan yang dilakukan dalam tingkat sejauh mana proses hasil pelaksanaan mendekati kesempurnaan.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sumber tenaga penyuluh KB menjadi faktor penghambat pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Dalam Buku Dr. Syaifuddin, MM (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernadin dan Russel mengemukakan

enam kinerja kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja yang menyatakan bahwa salah satu tahap dalam Cost-effectiveness yaitu sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung baik kinerja yang akan dihasilkan.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada Balai penyuluh KB masih belum cukup memadai. Karena dalam beberapa proses kerja masih membutuhkan alat yang dianggap dapat membantu menunjang hasil kerja yang maksimal di Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Dalam Buku Dr. Syaifuddin,MM (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernadin dan Russel mengemukakan enam kinerja kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja yang menyatakan bahwa salah satu tahap dalam yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sehingga menjadi faktor penghambat bagaimana melaksanakan tugas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

b) Faktor Pendukung

1. Komitmen dan Motivasi dalam Bekerja

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa koordinator penyuluh KB memberikan motivasi kepada para penyuluh untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling.

Hasil Penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Dalam Buku Dr. Syaifuddin,MM (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernadin dan Russel mengemukakan enam kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja yang menyatakan bahwa sudah cukup Baik dalam dan sudah bekerja sama dengan lintas sektor lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling.

2. Tanggung Jawab Pekerjaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan dapat disimpulkan yaitu kewajiban pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah baik sesuai dengan tupoksi Balai Penyuluh KB kecamatan Kelua

Hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan Dalam Buku Dr. Syaifuddin,MM (Dr. Syaifuddin, 2018) yang dipaparkan oleh Bernadin dan Russel mengemukakan enam kinerja kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja yang menyatakan bahwa salah satu tahap dalam *Need For Supervision* Tanggung Jawab dalam Tugas penyuluh dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang penyuluh KB sudah dilakukan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian ini,Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Balai penyuluh KB Kecamatan Kelua, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kelua. Cukup baik, hal ini dilihat dari aspek kinerja yakni: Pertama kualitas pada indikator Tingkat pendidikan dalam memberikan penyuluhan karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan dalam hal tujuan yang diharapkan masih ada masyarakat yang kurang paham tentang penyuluhan . Kedua Kuantitas Pada indikatornya Hasil kerja yang dilakukan dalam memberikan penyuluhan cukup baik dan Sesuai aturan SOP nya dalam melaksanakan

tugasnya sudah sudah baik. Ketiga Batas pada indikatornya ketepatan waktu yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya dalam penyuluhan cukup baik, dan sudah sesuai rencana juga sudah baik dalam memberikan tugasnya Keempat efektivitas biaya pada indikatornya: sumber daya manusia cukup baik dalam memberikan tugasnya, dalam Anggaran juga cukup baik, Teknologi yang masih kurang dalam memberikan penyuluhan dan sarana pendukung cukup baik dalam memberikan penyuluhan masih ada kendala yaitu kurangnya dana. Kelima kebutuhan dalam pengawasan pada indikator komitmen kerja cukup baik dan tanggung jawab sudah menyelesaikan tugasnya dengan sudah baik. Keenam tingkat ego cukup baik dan kerja sama sudah cukup baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi pertama faktor Penghambat yaitu ketidaksesuaian dengan tingkat pendidikan , kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. Kedua faktor pendukung adalah sudah bekerja sama dengan lintas sektor dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan penyuluhan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh keluarga berencana pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Kelua, diantaranya : pertama faktor penghambat yaitu Tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang merupakan faktor penghambat dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling, Kurangnya Sumber daya Manusia yang tidak dapat lepas dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan dan kurangnya sarana dan prasarana karena untuk menghasilkan kerja yang optimal dibutuhkan faktor pendukung seperti sarana dan prasarana seperti LCD proyektor dan komputer yang masih kurang. Kedua faktor pendukung yaitu kompetensi dalam motivasi dalam bekerja yang cukup baik dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan konseling. Selain itu tanggung jawab pekerjaan juga menjadi salah satu faktor pendukung karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'E-EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administras*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al 'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Dr. Syaifuddin (2018) *Motivasi & Kinerja Pegawai*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan

- Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mangkunegara, A.A.A.P. (2021) *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Prof. Dr. Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia',



Journal of Public Policy and Administration, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.